

# POLISI DAN PERKEMBANGAN ILMU KEMASYARAKATAN

Oleh : Fachry Ali

**P**olisi, sebagaimana kita ketahui, bukan lagi bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kesatuan terakhir ini adalah kelompok militer secara teknis. Dalam arti tugas anggota militer tersebut sepenuhnya terkonsentrasi pada pemeliharaan pertahanan nasional. Dalam konteks semacam ini, profesionalisme militer menjadi syarat utama. Secara lebih ekstrims bisa dikatakan bahwa karena tugas dan sifat profesionalismenya itu, korp militer "diperbolehkan" mengisolasi dari masyarakat.

Kecenderungan semacam ini tidak mungkin terjadi didalam dunia Kepolisian. Secara substantial, Polisi tidak lagi menjadi bagian dari korp militer. Karena tugasnya terpusat pada pemeliharaan keamanan, maka dengan sendirinya setiap anggota polisi harus menjadi bagian dari masyarakat. Faktor keamanan pada esensinya adalah ungkapan dari berbagai persoalan yang mengendap di tengah-tengah masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, konsentrasi penduduk yang terlalu tinggi pada suatu lokasi geografis, kelangkaan, kedangkalan bahkan keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan, untuk menyebut beberapa hal, adalah bagian integral dari masalah-masalah kemasyarakatan. Tetapi justru dengan fenomena sosial diatas, bisa menimbulkan persoalan keamanan. Salah satu bentuknya adalah kriminalitas. Persuaan yang begitu intens antar berbagai kelompok masyarakat dari kalangan muda yang tak terdidik dan miskin di kawasan perkotaan, misalnya, bisa menimbulkan godaan-godaan tertentu yang mengarah pada kriminalitas. Tingkat pengangguran yang akut di pedesaan dan perkotaan, sebagai contoh lainnya, sejatinya adalah masalah social. Namun kontinuitas



persoalan ini bisa menimbulkan masalah baru yang bercabang-cabang. Selain rawan terhadap kriminalitas, massa pengangguran tersebut bisa

dengan mudah termakan agitasi politik untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Ringkasnya faktor-faktor keamanan lebih banyak berkaitan dengan kondisi kemasyarakatan di sebuah lokasi daripada hal-hal teknis lainnya.

Dengan perspektif semacam inilah setiap anggota Kepolisian disyaratkan mengetahui perkembangan masyarakat secara intens. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang dinamika perkembangan masyarakat, akan sulit bagi anggota kepolisian memahami sumber-sumber persoalan yang mempengaruhi frekuensi ancaman keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Tetapi diatas segala-galanya, perhatian harus ditujukan kepada fenomena pemboman kota yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan pandangan agama tertentu. Bom-bom yang meledak di Bali dan di berbagai tempat lainnya, dalam perspektif di atas, harus juga kita lihat sebagai produk dari masalah sosial dan keagamaan. Kendatipun proses pembuatan bom dan peledakannya lebih banyak menyangkut masalah teknis, namun hampir bisa dipastikan sumber tindakan itu terkait dengan persepsi sekelompok orang tentang keadaan sosial-keagamaan di dalam masyarakat. Dalam arti kata lain, bom-bom tersebut

hanyalah alat sosial untuk menyuarakan aspirasi sekelompok masyarakat atau bagian dari ungkapan keresahan hati mereka terhadap perkembangan sosial ekonomi dan politik sebuah negara.

Karena itu, disamping harus memperlengkapi diri dengan keterampilan mengatasi keamanan yang telah terjadi, setiap anggota polisi disyaratkan juga memahami perkembangan pemikiran dan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat. Pengetahuan semacam ini menjadi sangat esensial terutama di masa kini, ketika setiap kelompok masyarakat mempunyai kebebasan menyampaikan pendapatnya, berkumpul atau berserikat menurut kehendak anggota-anggotanya. Karena tindakan-tindakan represif tidak mungkin diulang seperti yang terjadi masa Orde Baru, maka setiap anggota Polisi sudah harus mempersiapkan diri sebagai tenaga-tenaga "ahli" dalam bidang kemasyarakatan, potensi-potensi gangguan keamanan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bisa direduksi atau dihilangkan sama sekali.

Kasus Imam Samudra dan kawan-kawan adalah contoh penting dalam hal ini. Berangkat dari sekumpulan orang dengan pandangan agama tertentu, Imam Samudra dan kawan-kawan mempunyai keyakinan bahwa dunia harus diubah sesuai dengan ajaran-ajaran yang dianutnya. Berbekal keyakinan tersebut, mereka melakukan kekerasan untuk mencapai "tujuan suci", menurut persepsi mereka. Jelas di sini kita melihat alam gagasan, persebaran ide yang bersifat radikal semacam ini adalah sesuatu yang tak kongkret, dan karena itu tak bisa segera diketahui dengan jelas. Akan tetapi, jika setiap anggota Polisi telah diperlengkapi dengan ilmu kemasyarakatan, maka pengendusan hal-hal semacam ini menjadi lebih mungkin dilakukan dengan melihat permasalahan-permasalahan sosial yang berkembang. Walau tentu saja tidak bisa dituntaskan dengan menyeleuruh, namun dengan kemampuan membuat peta permasalahan sosial, setiap anggota Polisi akan mampu mengantisipasi jenis-jenis kerawanan dan ancaman keamanan apa yang bakal muncul dari corak masyarakat tertentu.

Karena itu, disamping dunia Kepolisian begitu kaya dengan berbagai kasus kriminalitas berbasis masalah sosial, sudah saatnya Polri mengembangkan disiplin ilmu kemasyarakatan, sebagai bagian integral memelihara keamanan. ■